

**PROFIL JABATAN STRUKTURAL  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Nama Lengkap : Dra. Monika Nur Lastiyani  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Katholik  
 Instansi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IV/d

**A. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL**

NO	JABATAN	INSTANSI	TMT
1	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi	Kantor Arsip Daerah	2007
2	Kepala Sub Bagian Program, Data dan TI	Sekretariat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2009
3	Kepala Bidang Pengembangan Peprustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2012
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2014
5	Kepala Balai Layanan Perpustakaan	Balai Layanan Perpustakaan	2015
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2016
7	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2018
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	2019

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

NO	SEKOLAH	JURUSAN	TAHUN
1	IKIP Sanata Dharma Yogyakarta	S-1 Akuntansi	1987
2	Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa	S-2 Magister Manajemen	2008



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MONIKA NUR LASTIYANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **106712**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.590.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m<sup>2</sup>/48 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 621 m<sup>2</sup>/621 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
5. Tanah Seluas 142 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 267 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 153.350.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.900.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
3. MOTOR, HONDA GL Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, YAMAHA B66 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



25.750.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	642.350.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	140.475.190
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.526.175.190
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	750.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.776.175.190

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.